

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

United Nations International Strategy for Disaster Reduction atau UN-ISDR (2011, h13) menjelaskan bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. UN-ISDR (2002) membagi jenis bencana meliputi *geological hazards, hydrometeorological hazards, biological hazards, technological hazards dan Environmental hazards*. *Emergency Events Database* (EM-DAT) mencatat, sejak tahun 1994 hingga 2013 telah terjadi bencana alam di seluruh dunia sebanyak 6.873 bencana (*The Centre for Research on the Epidemiology of Disaster/ CRED*, 2015 disitasi Ratnawati, 2015, h1). Asia-Pasifik merupakan wilayah yang paling rawan bencana alam di dunia. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), menunjukkan kematian akibat bencana di Kawasan Asia-pasifik naik lebih dari tiga kali lipat dalam dekade terakhir diakibatkan bencana yang ekstrim. Bencana alam yang terjadi di dunia antara tahun 2004 dan 2013 dilaporkan 41,2 % atau 1.690 kejadian terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Di antara sub wilayah Asia-Pasifik, Asia Tenggara terutama Indonesia dan Filipina yang paling terpuak oleh bencana alam yang menewaskan lebih dari 350.000 yang akibat dari 500 lebih insiden (*United Nations Information Center. Laporan Asia-Pasifik 2014*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan mengalami bencana alam. Tahun 2005, *International Strategy for Disaster Reduction 2006-2009 dan World Disaster Reduction Campaign dan United Nations Educational Scientific And Cultural Organizations* (ISDR/UNESCO) menetapkan Indonesia pada urutan ke-7 (tujuh) Negara di dunia yang rawan bencana alam. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2015-2019 menyebutkan ada 3 faktor utama penyebab bencana, antara lain yaitu bahaya alam dan bahaya karena ulah manusia, kapasitas yang rendah pada berbagai komponen di tingkat masyarakat, serta

kerentanan yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur dan elemen di dalam kota/kawasan yang beresiko bencana (Ningtyas, 2014, h1).

Wilayah Indonesia ditinjau secara geografis, geologis, geomorfologis, meteorologis, klimatologis merupakan daerah rawan bencana karena Indonesia termasuk negara tropis dengan curah hujan tinggi dan mengalami dua musim berbeda serta topografi yang kasar, maka berpotensi terjadinya banjir (*flood*), tanah longsor (*landslide*), dan kekeringan (*drought*) serta kebakaran hutan (*forest fire*). Wilayah Indonesia merupakan tempat bertemunya tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia, dan lempeng Pasifik yang mengakibatkan wilayah Indonesia rawan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Wilayah Indonesia juga terdapat beberapa gunung api yang masih aktif sampai sekarang diantaranya gunung sinabung, gunung kelud dan gunung merapi yang mengalami erupsi pada tahun 2014 (Sudibyakto, 2011).

Erupsi gunung api tercatat sebanyak 5 kejadian sepanjang tahun 2014 antara lain Erupsi Gunung Sinabung, Gunung Kelud, Gunung Sangeangapi, Gunung Slamet, dan Gunung Gamalama. Total 24 orang tewas, 128.167 jiwa mengungsi, dan 17.833 rumah rusak. Erupsi Gunung Sinabung menyebabkan 2.443 jiwa (795 KK) mengungsi di 7 titik dan sebanyak 1.212 jiwa (370 KK) harus direlokasi. Erupsi Gunung Kelud menyebabkan 7 tewas, sekitar 90 ribu orang mengungsi, dan 17 ribu lebih rumah rusak. Mengingat masyarakat sekitar Gunung Kelud sudah tangguh menghadapi bencana, dan memaknai erupsi sebagai warisan masa depan, maka pemulihan berjalan dengan cepat. Erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menyebabkan 277 orang meninggal di wilayah D.I. Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah. Dampak erupsi gunung Merapi bisa terjadi pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Erupsi gunung Merapi tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi erupsi tersebut juga berdampak pada keluarga antara lain menyebabkan trauma pada keluarga, stress, terpisahnya dari anggota keluarga lainnya, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian dan trauma yang berkepanjangan setelah terjadi bencana (Kaakinen, Duff, Coehlo, Hanson 2010, h494).

Gunung Merapi merupakan gunung teraktif di Indonesia. Gunung yang menjulang setinggi 2978 meter di atas permukaan laut. Secara administratif gunung merapi terletak di dua provinsi yaitu D.I. Yogyakarta dan provinsi Jawa Tengah (BPBD Kab Klaten 2015, h21). Gunung Merapi terakhir meletus pada tahun 2010 yang

letusannya memberikan dampak sangat besar, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Letusan Gunung Merapi mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi. Letusan Gunung Merapi tersebut menimbulkan bahaya yang berupa bahaya primer seperti awan panas, abu vulkanik, gas beracun dan bahaya sekunder berupa lahar dingin yang akan terus berlangsung pada musim penghujan setelah terjadi erupsi (Lavigne, 2000 disitasi Budiani, 2014, h106-107).

Letusan Gunung Merapi menyebabkan bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer dari Gunung Merapi seperti abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan memicu munculnya beberapa penyakit seperti batuk, pusing dan penyakit pernapasan kambuhan seperti asma dan sesak nafas. Abu vulkanik juga mengandung beberapa gas yang berbahaya antara lain, sulfur dioksida dan karbon monoksida dan silika yang bersifat bersifat karsinogenik dan bisa menimbulkan penyakit kanker (Wulan, 2010) sedangkan bahaya sekunder seperti lahar dingin yang terjadi pada musim penghujan dan membawa material-material seperti pasir dan batu-batuan. Letusan Gunung Merapi juga mengakibatkan korban jiwa, BPBD Kabupaten Magelang (2014) menjelaskan sejak abad ke-20 korban meninggal akibat letusan Merapi dan banjir lahar dingin tercatat sekitar 1987 jiwa, dengan korban terbanyak pada letusan tahun 1930 sekitar 1369 jiwa. Letusan dahsyat abad ke-21 terjadi tahun 2010. Letusan tersebut menghancurkan Desa Kinahrejo Kecamatan Cangkringan Yogyakarta dengan korban meninggal dunia tercatat 388 jiwa yang terdapat di provinsi Jawa Tengah tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang (BPBD Magelang, 2010).

Data Indeks Rawan Bencana (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah menempati ranking pertama tingkat nasional sebagai daerah rawan bencana. Sementara itu, masih berdasarkan Data IRBI Tahun 2011, Data Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Klaten tingkat kerawanan tinggi dan Kabupaten Klaten menempati ranking 19 dari seluruh Provinsi Jawa Tengah. BNPB (2010) mencatat, erupsi Gunung Merapi tahun 2010 di Kabupaten Klaten mengakibatkan 36 orang meninggal, 30 orang luka-luka (rawat inap) dan 4.321 orang mengungsi. Kecamatan Kemalang terdiri dari 13 Desa dan jumlah penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2010 mencapai 35.446 jiwa dengan kepadatan penduduk 686 jiwa/ (Badan Pusat Statistik/ BPS Klaten, 2015).

Penduduk yang terdampak erupsi gunung merapi 2010 terdapat di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Kemalang.

Salah satu daerah rawan bencana di Kecamatan Kemalang adalah desa Tegalmulyo. Desa Tegalmulyo merupakan salah satu desa paling utara yang berada di kawasan lereng Gunung Merapi wilayah Kabupaten Klaten dan berada di Kawasan Resiko Bencana III (KRB III) Gunung Merapi (Mahendra, 2014, h3). Sudibyakto (2011) disitasi Lindawati (2015, h1) menjelaskan KRB III merupakan zone larangan untuk dihuni tetap sebagai pemukiman. Masyarakat memilih untuk tetap tinggal di tempat tersebut karena hubungan virtual yang telah terjalin diantara mereka sebagai manusia dan pemanfaat, serta alam diwakili oleh gunung api Merapi, tingkat kesuburan tanah sehingga sulit meninggalkan tanah kelahiran sehingga diperlukan upaya kesiapsiagaan terhadap semua masyarakat, individu, dan keluarga. Kondisi seperti ini memerlukan antisipasi program atau program penanggulangan bencana dari pemerintah (Rijanta, Hizbaron dan Baiquni 2014 disitasi Lindawati 2015, h2)

Pemerintah Indonesia mengarahkan upaya penanggulangan bencana ke dalam strategi pembangunan nasional melalui publikasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah juga telah mempublikasikan aturan yang mengatur masalah penanggulangan bencana untuk melengkapi UU Nomor 24 Tahun 2007, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Pemerintah telah mengamanatkan tiap wilayah yang memiliki potensi ancaman bahaya untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dimaksud sebagai pemegang kendali koordinasi multi sektor saat terjadi bencana. Terbentuknya lembaga BPBD di setiap daerah berdasarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD menyiratkan adanya kelembagaan pemerintah daerah yang dapat menjadi koordinator antar instansi atau lembaga terkait dalam penanggulangan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.

Upaya penanggulangan bencana telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Laporan Internasional Federation of Red Cross and Crescent Societies* atau IFRCRCS (2005) disitasi Indiyanto (2012, h23) menyatakan pemerintah Indonesia telah memberikan alokasi perhatian pada kebencanaan sejak 1966 dengan pembentukan tim penanggulangan kondisi darurat yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 1979 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Upaya-upaya Kesiapsiagaan juga diperlukan untuk mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, individu juga perlu melakukan kesiapsiagaan bencana guna mengurangi kerugian akibat bencana.

Upaya kesiapsiagaan pada setiap individu atau kelompok tidak sama tergantung pada tingkat kesiapsiagaan bencana yang dipengaruhi oleh faktor sosial demografi, jejaring sosial, dan pengalaman banjir sebelumnya (Lindell and Perry, 2000 dalam Kirschenbaum, 2002). Tingkat pengetahuan tentang kesiapan bencana yang dimiliki tiap individu berbeda-beda sehingga akan menimbulkan respon yang beragam saat individu menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam atau non-alam. Tingkat pengetahuan yang baik akan berkontribusi terhadap terciptanya rasa aman dan minimalisasi korban bencana. Upaya-upaya kesiapsiagaan diperlukan untuk meminimalkan korban bencana dalam bentuk kegiatan yang di mulai dari penyadaran masyarakat, keluarga, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini tentang gunung merapi, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, keluarga, individu untuk melakukan persiapan dalam menghadapi bencana melalui tindakan kesiapsiagaan, dengan tujuan untuk mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kemampuan menangani bencana.

Kesiapsiagaan yang berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan organisasi PBB, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun masyarakat yang melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Ada 7 (tujuh)

stakeholders yang berkaitan erat dengan kesiapsiagaan masyarakat dan tiga diantaranya merupakan *stakeholders* utama, yaitu : individu dan rumah tangga, pemerintah dan komunitas sekolah. (LIPI– UNESCO/ISDR, 2006, h19). Salah satu *stakeholders* utama yang memerlukan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana yaitu rumah tangga. Keluarga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatasi bencana alam, karena peran keluarga dalam kesiapsiagaan sangat penting alasannya kepala keluarga berperan dalam menyampaikan informasi bagi anggota keluarganya, mengambil keputusan yang cepat dapat mempengaruhi anggota keluarga, kepala keluarga sebagai sumber dukungan sosial bagi keluarganya dan kepala keluarga dijadikan panutan oleh anggota keluarganya (Effendi, 2009 disitasi Kumoro, 2013, h2). Kemampuan yang harus dimiliki kepala keluarga sebagai wujud dari kesiapsiagaan adalah mempunyai pengetahuan dan sikap terhadap bencana seperti ketrampilan pertolongan pertama, menggerakkan anggota keluarga untuk mengikuti latihan dan keterampilan evakuasi, menyiapkan kebutuhan makanan yang dapat disimpan dan tahan lama, menyiapkan kotak P3K di rumah (LIPI– UNESCO/ISDR, 2006, h20-21).

Penelitian sebelumnya (Rante, 2012, h7) menjelaskan kurang siapnya rumah tangga menghadapi bencana longsor karena mereka belum memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan tersebut meliputi rendahnya kemampuan mengenali bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan tempat tinggal, kemampuan mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana, dan kesadaran untuk mengelola lingkungan tempat tinggal yang ramah bencana. Kesiapsiagaan masyarakat khususnya keluarga memiliki kesiapan menghadapi bencana sangat penting hal tersebut untuk mengurangi korban jiwa. Kesiapsiagaan perlu terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana khususnya keluarga yang tinggal di dekat wilayah rawan bencana khususnya di Desa Tegalmulyo. Penelitian ini akan dilakukan di daerah yang terkena dampak bahaya gunung merapi yaitu di Desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang dengan jumlah 748 KK (Kepala Keluarga) yang terkena dampak bahaya gunung merapi (Laporan Kependudukan Desa Tegalmulyo 2015). Desa Tegalmulyo salah satu desa yang terkena dampak bahaya gunung merapi selain Desa Balerante dan Desa Sidorejo dan belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang kesiapsiagaan keluarga di Desa Tegalmulyo.

B. Rumusan masalah

Kecamatan kemalang terdiri dari 13 desa diantaranya berlokasi paling dekat dengan puncak merapi atau yang disebut dengan Kawasan Rawan Bencana III yaitu Balerante, Siderejo, dan Tegalmulyo. Desa Tegalmulyo merupakan salah satu desa yang masuk diwilayah KRB III atau wilayah yang terdekat dengan gunung merapi dengan jarak \pm 6 km dari puncak merapi. Kemungkinan bahaya gunung merapi yang terjadi di Desa Tegalmulyo seperti abu vulkanik, awan panas, lahar dingin. Masyarakat harus memiliki upaya kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu gunung merapi mengalami peningkatan status, penelitian sebelumnya (Sagala & Wimbardana, 2013, h404) menunjukkan kesadaran mengenai pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana belum dimiliki oleh masyarakat dan bukan berasal dari pelatihan atau pemberitahuan dari pemerintah melainkan pengalaman mereka yang telah lama mengalami bencana.

Hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti terhadap 10 partisipan di Desa Tegalmulyo mengenai kesiapsiagaan keluarga menghadapi bencana seperti adanya pelatihan-pelatihan tentang bencana, stimulasi menghadapi bencana dan adanya tas bencana didapatkan 6 keluarga yang pernah mengikuti pelatihan dan stimulasi bencana sedangkan 4 keluarga tidak pernah mengikuti pelatihan stimulasi bencana. Pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana masih kurang dan kesiapsiagaan menghadapi bencana terjadi belum maksimal. Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti merumuskan masalah “Bagaimana Pengalaman Keluarga Dalam Mempersiapkan Diri Menghadapi Bahaya Gunung Merapi Di Desa Tegalmulyo”?.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang arti dan makna pengalaman keluarga dalam mempersiapkan diri menghadapi bahaya gunung merapi di Desa Tegalmulyo.

2. Tujuan Khusus

Teridentifikasinya :

- a. Pengetahuan dan sikap keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi
- b. Kebijakan keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi

- c. Rancana tanggap darurat keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi.
- d. Sistem peringatan bencana keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi.
- e. Mobilisasi sumber daya keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi.
- f. Harapan keluarga dalam menghadapi bahaya gunung merapi

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. BPBD

Hasil penelitian ini sebagai acuan agar dapat membina keluarga di desa di wilayah kerja BPBD Kabupaten Klaten untuk mengurangi resiko bencana dengan sering melaksanakan stimulasi penyelamatan diri saat bencana sehingga pengetahuan keluarga menjadi meningkat dan kesiapsiagaan keluarga menjadi siaga terhadap ancaman bahaya gunung merapi.

2. Perawat Komunitas

Hasil penelitian ini sebagai dasar perawat memberikan intervensi keperawatan mengenai penanggulangan bencana ke sekolah, masyarakat desa, kota, pekerja, dan tempat-tempat yang cenderung beresiko ancaman bahaya gunung merapi sehingga kesiapsiagaan masyarakat khususnya kepala keluarga menjadi meningkat agar korban jiwa jika sewaktu-waktu terjadi bencana gunung merapi dapat ditekan. Khususnya untuk tenaga keperawatan agar meningkatkan pertolongan awal dengan penatalaksanaan yang tepat dan cepat saat awal kejadian bencana gunung merapi untuk menurunkan angka kejadian yang mengancam jiwa.

3. Keluarga

Hasil penelitian ini agar keluarga dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana baik dari pengetahuan dan sikap, kebijakan keluarga, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya keluarga menghadapi bencana.

4. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bahaya gunung merapi.

E. Keaslian penelitian

1. Hidayati, N D (2014). Dengan judul *Kesiapan Tanggap Bencana Masyarakat Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Terhadap Ancaman Erupsi Gunung Kelud*.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survey. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi serta analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sampel diambil secara *proporsional random sampling* yaitu kepala keluarga yang tinggal di wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sebanyak 100 kepala keluarga.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat di KRB III memiliki tingkat partisipasi rendah namun memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman tentang bencana yang tinggi. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di KRB III disebabkan mereka merasa sudah mampu mitigasi diri mereka sendiri dengan pemahaman dan pengalaman yang mereka miliki. Masyarakat di KRB II memiliki tingkat partisipasi, pemahaman, dan pengalaman yang termasuk dalam kategori rendah. Hal itu dikarenakan masyarakat di KRB II belum lama tinggal di daerah tersebut sehingga belum memiliki rasa memiliki terhadap lingkungan dan keterikatan tempat dengan lingkungan tersebut. Masyarakat di KRB I memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Rendahnya tingkat partisipasi di KRB I disebabkan karena masyarakat di KRB I merasa lokasi tempat tinggalnya tidak terlalu dekat dengan Gunung Kelud maka kerugian yang akan diterima juga akan sedikit, sehingga masyarakat di KRB I merasa tidak perlu ikut dalam partisipasi tanggap bencana. Walaupun masyarakat di KRB I memiliki partisipasi yang rendah, namun pemahaman dan pengalaman yang mereka miliki termasuk tinggi. Pemahaman dan pengalaman tersebut mereka peroleh berdasarkan peristiwa bencana Gunung Kelud pada waktu yang

lampau, karena lama tinggal masyarakat KRB I sebagian besar sudah sejak lahir.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, cara pengambilan partisipan dengan *purposive sampling* dan cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan catatan lapangan.

2. Prihatmono, I G, Tarra, H J (2013). Dengan judul *Perilaku Tanggap Bencana Erupsi Gunung Merapi Keluarga E.S. Yang Tinggal Di Hunian Tetap Pedukuhan Kuwang Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif menggunakan desain studi kasus tunggal komprehensif. Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi langsung pada sumber data. Pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik sampling non random purposive sampling yaitu memilih satu keluarga yang tinggal di hunian tetap Kuwang Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta dengan kriteria inklusi adalah : keluarga yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi 2010, ikut mengungsi, saat ini tinggal di rumah hunian tetap , masih lengkap terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tinggal di daerah rawan bencana gunung Merapi selama lebih dari 20 tahun, rumah hunian lamanya tidak dapat ditinggali lagi, terdiri dari ayah, ibu, dan anak, bermatapencaharian petani, kepala keluarga laki-laki, tingkat pendidikan kepala keluarga SLTA, lancar berbahasa Indonesia, masih produktif secara ekonomi, kepala keluarga berumur maksimal 60 tahun dan kooperatif.

Hasil penelitian ini yaitu Penelitian dilakukan selama empat hari dengan 1 sampel keluarga Keluarga ES yang terdiri dari Bp. ES, Ny. S, Sdr. AK, dan Sdr. AD. Hasil studi kasus menunjukkan perilaku tanggap bencana erupsi Gunung Merapi pada keluarga ES menunjukkan pengetahuan tanggap bencana keluarga Bp. ES masih dalam kategori tahu, sikap keluarga Bp. ES dalam kategori bertanggung jawab dalam menghadapi bencana erupsi Merapi, dan tindakan dalam kateori praktek terpimpin dalam mempersiapkan, ikut mengungsi dan melakukan pemulihan pasca erupsi Gunung Merapi. Peneliti menyimpulkan bahwa secara mental keluarga telah siap menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi, tetapi secara pengetahuan dan tindakan keluarga masih memiliki

kekurangan dalam persiapan, respon, dan pemulihan. Pelatihan persiapan menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi perlu terus diadakan secara berkala untuk memberikan pengalaman yang berbeda agar kerugian korban jiwa dan materi dapat diminimalisir.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, cara pengambilan partisipan dengan *purposive sampling* dan cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan catatan lapangan.

3. Permanasari, A H, Sunarto (2011). Dengan judul *Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Gunung Merapi : Studi Kasus di Desa Umbulharjo, Sleman*.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu melalui observasi dilanjutkan dengan indepth interview untuk mengumpulkan data primer melalui daftar pertanyaan yang terbuka terhadap masyarakat, tokoh masyarakat, kader, bidan, dan Kepala Desa Umbolharjo. Semua wawancara direkam menggunakan tape recorder. Peneliti juga menggunakan kamera untuk dokumentasi serta buku catatan. Kesimpulan penelitian ini yaitu pengetahuan tentang desa siaga belum terlalu baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui desa siaga.

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif, cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan catatan lapangan dan cara pengambilan partisipan dengan *purposive sampling*.